



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-9/DPRD/9/2021

NOMOR : 180/ **g** /SKB-HK/2021

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 8 (DELAPAN) BUAH RAPERDA
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.113/HK-PerUU/IX/2021 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 4 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13 September 2021 tentang Penyampaian Laporan Bapemperda dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Keputusan Bersama terhadap 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 untuk di bahas dan ditetapkan tahun 2021
- KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Lampiran Persetujuan bersama terhadap Raperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

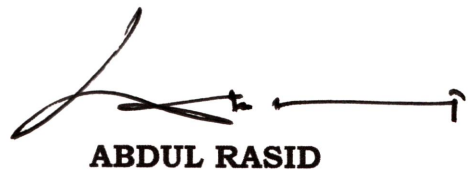
Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 13 September 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TENTANG RAPEPERDA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2021

NOMOR : 170 /SK-9/DPRD/9/2021
NOMOR : 180/ 9 /SKB-HK/2021

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

RAPEPERDA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

NO	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT	PELAKSANAAN	INSTANSI/ INDIKATOR	PENYAMPAIAN KE DPRD TAHUN
1.	Raperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;		Cabut	2021	Dinas Kesehatan	2021
2.	Raperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja		Cabut	2021	Dinas Kesehatan	2021

	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;					
3.	Raperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Cabut	2021	Dinas Kesehatan	2021	
4.	Raperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara	Cabut	2021	Korpri	2021	
5.	Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	Ubah	2021		2021	
6.	Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan	Ubah	2021		2021	

	Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Ubah	2021		2021
7.	Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu	Ubah	2021		2021
8.	Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Ubah	2021		2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ABDUL RASID